



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ACHMADI**
2. Jabatan : **WAKIL KETUA**
3. NHK : **13244**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m²/129 m² di BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m²/120 m² di SRAGEN, WARISAN Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m²/255 m² di KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m²/360 m² di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 48 m²/96 m² di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 293.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 36.350.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 43.329.509**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 5.172.679.509



III. HUTANG

Rp. 128.364.421

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.044.315.088

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.